



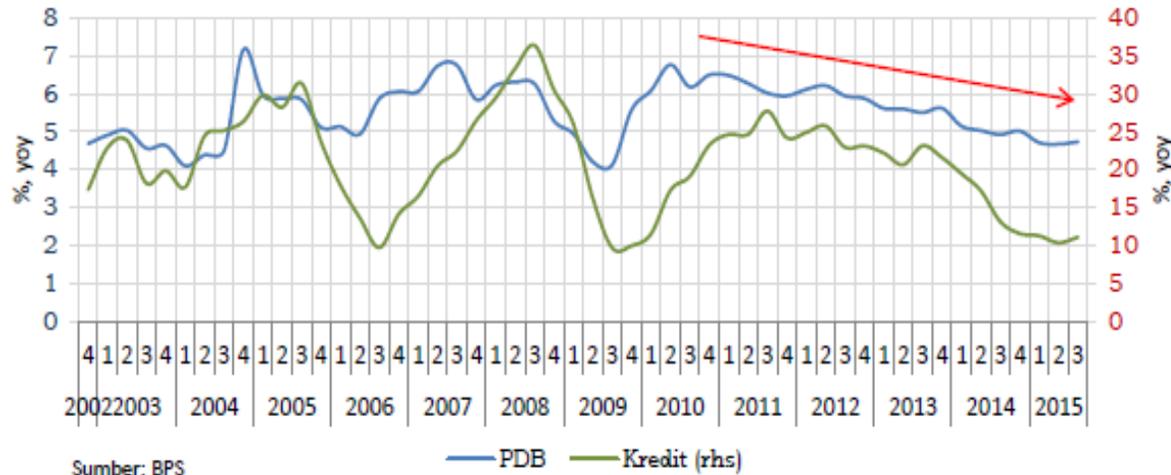
INDONESIA's ECONOMY AND THE PROSPECT FOR BANKING INDUSTRY IN 2016

Desember 2015





Trend Penurunan Kredit sejak 2011



Pertumbuhan PDB dan kredit perbankan Indonesia mengalami tren penurunan sejak awal tahun 2011.



Siklus turun saat ini merupakan yang terpanjang sejak tahun 2004

Stimulus Agustus 2015

Melalui Surat kepada seluruh industri perbankan No.S-29/D.03/2015 tanggal 12 Agustus 2015 dilakukan Penegasan (Restatement) Beberapa Pengaturan Kehati-Hatian di Sektor Perbankan dalam rangka Mendukung Stimulus Perekonomian Nasional.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

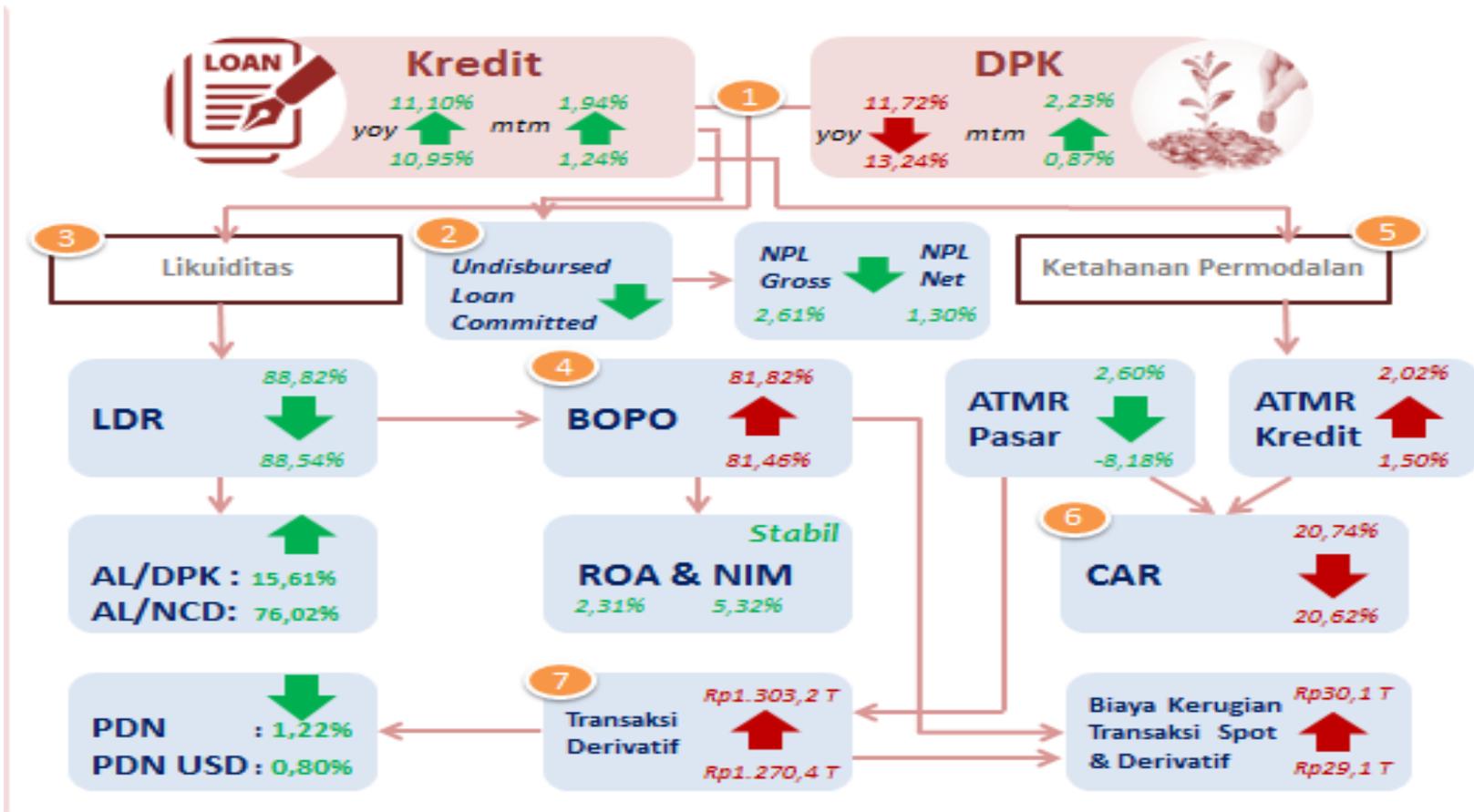
Paket Kebijakan I, 9 September 2015 : Pembukaan rekening oleh WNA untuk Meningkatkan pasokan valas sehingga diharapkan dapat membantu stabilitas nilai tukar dan memperdalam pasar valas domestik

Paket Stimulus III , 7 Oktober 2015 : Relaksasi Persyaratan untuk Melakukan Kegiatan Trust Relaksasi PBI No. 14/17/PBI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust)

Paket Stimulus IV : Penegasan Ketentuan Penetapan Kualitas Aset terkait One Project Concept

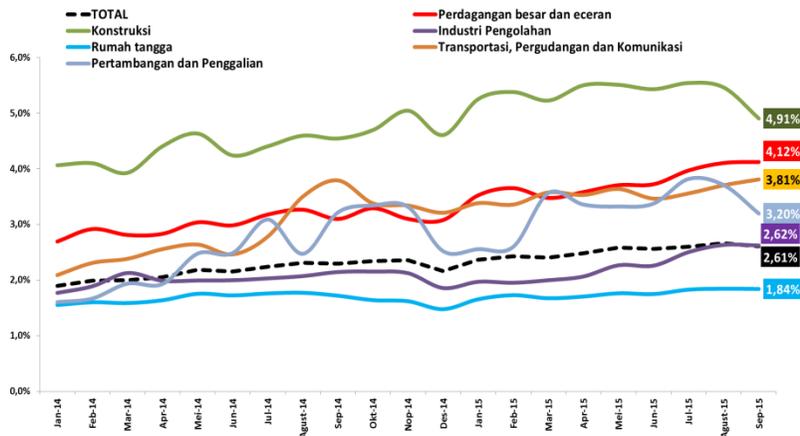
Kondisi Perbankan pada akhir 2015

Secara umum kinerja keuangan perbankan masih terjaga baik dan relatif stabil tercermin dari fungsi intermediasi yang berjalan normal, permodalan yang masih kuat, rentabilitas perbankan masih terjaga baik, dan efisiensi perbankan masih terjaga baik meskipun sedikit mengalami penurunan.



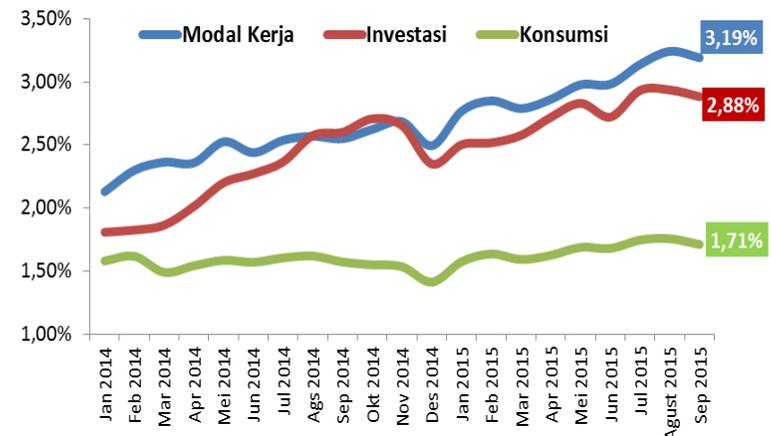
Peningkatan NPL Terjadi Seiring dengan Perlambatan Ekonomi

Rasio NPL Sektoral



Perdagangan Besar dan Eceran mengalami peningkatan NPL

Rasio NPL menurut jenis penggunaan



NPL Kredit Modal Kerja dan investasi bergerak meningkat seiring dengan perlambatan ekonomi

Upaya Restrukturisasi dilakukan untuk memperbaiki kondisi

		Sep-14	Des-14	Mar-15	Jun-15	Jul-15	Agust-15	Sep-15	Growth Jul-Sep'15
1	Industri Pengolahan	16.372	18.076	19.334	23.906	26.036	27.258	30.298	16,4
2	Perdagangan Besar dan Eceran	10.913	11.612	12.587	15.478	17.788	19.520	23.455	31,9
3	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	10.283	10.043	11.810	14.250	15.350	15.515	16.094	4,8
4	Pertambangan dan Penggalian	5.297	5.766	9.102	11.826	12.167	12.633	13.887	14,1
5	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	5.058	5.334	6.104	6.916	7.534	8.173	8.323	10,5
6	Konstruksi	4.257	4.804	5.286	5.749	6.196	6.411	7.362	18,8
7	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	1.458	1.711	1.957	2.465	2.797	2.929	3.651	30,5
8	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	2.191	2.247	2.326	2.988	3.326	3.114	3.536	6,3
9	Listrik, gas dan air	2.891	3.100	2.725	3.602	3.625	3.604	3.218	-11,2
10	Lainnya	10.558	11.137	10.680	10.768	10.639	11.606	12.221	14,9
Total Kredit Restrukturisasi (Rp Miliar)		69.279	73.829	81.910	97.948	105.458	110.762	122.045	15,7

- Kredit restrukturisasi mengalami kenaikan signifikan sejak Juni 2015 terutama sektor perdagangan besar dan eceran, sektor penyediaan akomodasi dan sektor konstruksi.

1

Kondisi 2015

2

Tantangan di 2016

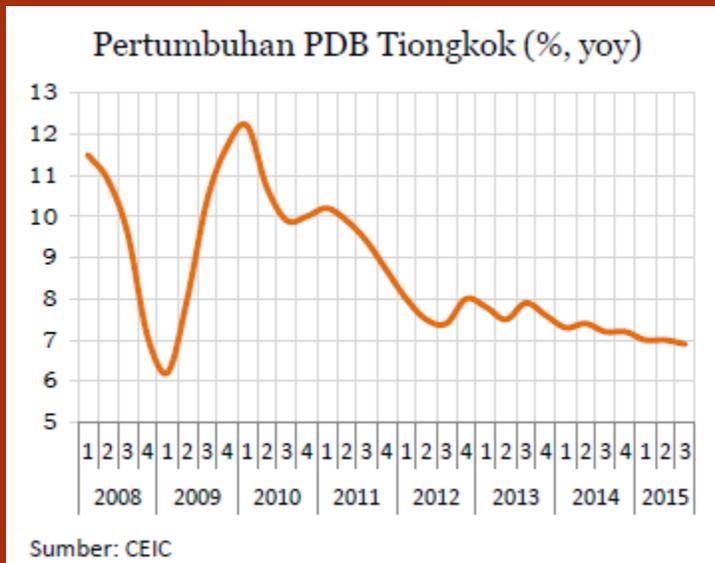
3

Arah Kebijakan

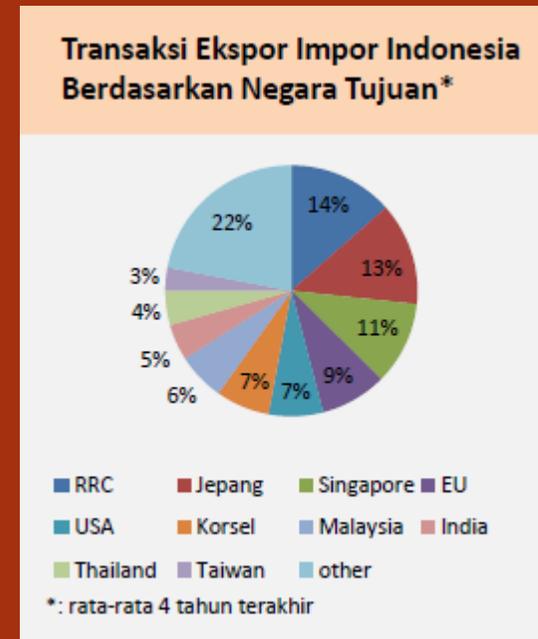
Perlambatan Ekonomi Tiongkok

Perlambatan pertumbuhan sektor industri di Tiongkok berpengaruh signifikan terhadap penurunan impor Tiongkok. Indonesia yang ekspornya berorientasi komoditas berisiko terkena dampak perlambatan tersebut.

Tiongkok sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua dunia berpengaruh besar terhadap pertumbuhan PDB dunia.



Tiongkok merupakan mitra dagang Indonesia terbesar



Outlook 2016

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2016 diperkirakan akan menunjukkan perbaikan walaupun tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2015 dengan tingkat inflasi yang moderat. Pertumbuhan kredit perbankan diperkirakan mengalami sedikit peningkatan.

	PDB		Inflasi	
OJK	4,7%-4,9%	5,1%-5,3%	3,0%-4,0%	4,5%-5,5%
Kementerian Keuangan ¹	4,8%	5,3%	5,0%	4,7%
Bank Indonesia ²	4,7%-5,1%	5,2%-5,6%	3,0%-5,0%	3,0%-5,0%
IMF ³	5,2%	5,1%	4,6%	5,4%
ADB ⁴	4,9%	5,4%	6,7%	5,1%
OECD ⁵	4,7%	5,2%	6,7%	6,3%
World Bank ⁶	4,7%	5,3%	6,5%	5,2%
Danareksa Research Institute ⁶	4,9%	5,4%	4,0%	4,5%
BNI Securities ⁶	4,8%	5,4%	4,0%-5,0%	4,5%-5,5%
Bank Maybank Indonesia ⁶	4,8%	5,0%	3,2%	4,7%
Bank Permata ⁶	4,7%	5,0%	4,5%	5,5%
Mandiri ⁶	5,3%	5,8%	6,0%	5,1%
	Kredit		DPK	
OJK	10,0%-12,0%	12,0%-14,0%	11,0%-13,0%	13,0%-15,0%

1

Kondisi 2015

2

Tantangan di 2016

3

Arah Kebijakan 2016

Arah Kebijakan Bank Umum di Tahun 2016

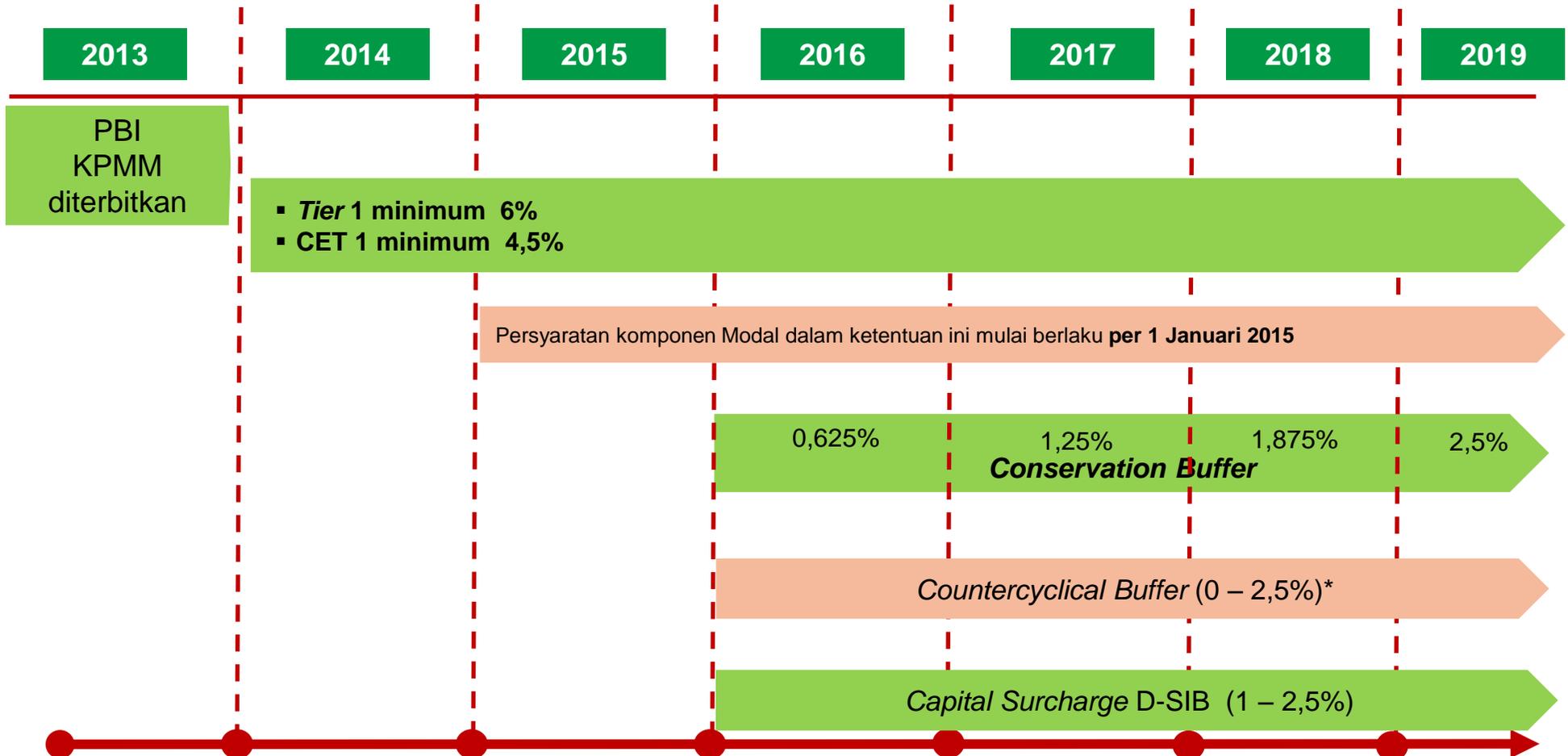
Peningkatan Daya Tahan dan daya Saing

Financial inclusion untuk perluasan pasar dan mendorong pembangunan

Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah

- ➔ Penguatan dan Penerapan standar Internasional : Basel III (KPMM dan LCR)
- ➔ Dorongan untuk melakukan pembiayaan pada sektor ekonomi prioritas
 - Dukungan untuk Sektor Kelautan dan perikanan Melalui Program Jaring
- ➔ Dorongan untuk melakukan pembiayaan proyek berkelanjutan (sustainable finance)
- ➔ Pengawasan Terintegrasi
- ➔ Dorongan untuk mengembangkan kemampuan SDM Perbankan dan penerapan System Remunerasi yang Prudent

Penerapan Basel III sebagai salah satu upaya menciptakan stabilitas system keuangan



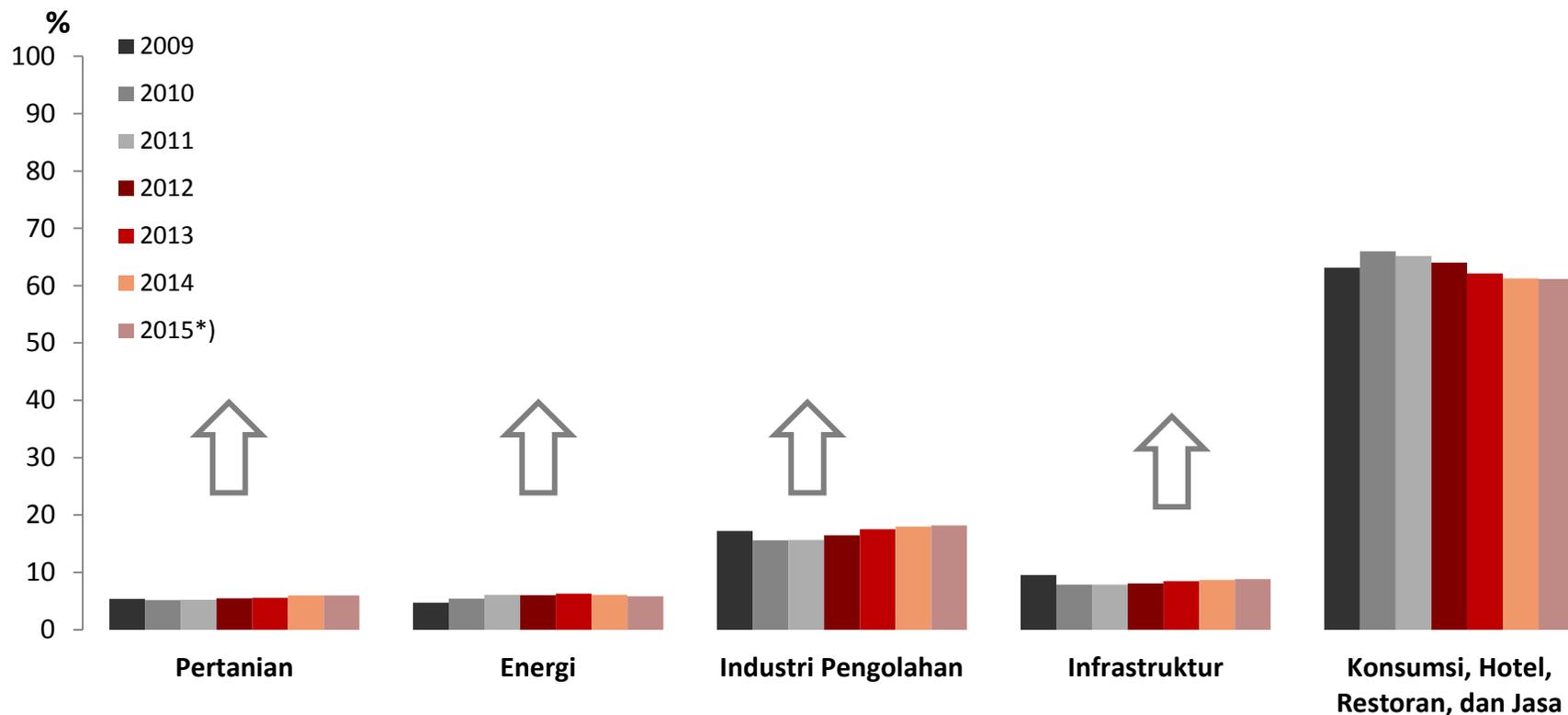
*Berdasarkan penilaian atas kondisi makroekonomi, Bank Indonesia dapat menerapkan *Countercyclical Buffer* lebih cepat dari tahun 2016

LCR sebagai bagian dari pemenuhan Basel III

Kewajiban pemenuhan LCR dipenuhi secara bertahap sebagai berikut:

Tahap pemenuhan LCR	70%	80%	90%	100%
BUKU 4 dan KCBA	31 Desember 2015	31 Desember 2016	31 Desember 2017	31 Desember 2018
BUKU 3 dan Bank Asing selain KCBA	30 Juni 2016	30 Juni 2017		

Bank didorong untuk mendukung sektor yang memiliki multiplier-effect tinggi



Pengembangan Perbankan nantinya akan mendorong sektor-sektor jasa keuangan di Indonesia untuk meningkatkan portofolionya di sektor-sektor prioritas pembangunan Indonesia yaitu **(1) Pertanian, (2) Pertambangan & Energi (listrik, Gas dan Air) , (3) Infrastruktur (konstruksi serta Transportasi, Pergudangan dan komunikasi), dan (4) UMKM.**

Industri Pemrosesan juga akan menjadi sektor prioritas yang saat ini portofolionya telah lebih dari 10%

Program JARING OJK-KKP

DEFINISI & TUJUAN PROGRAM

1. Program JARING 2015 merupakan program inisiatif jangka pendek OJK (Regulator) dan KKP (Pemerintah) untuk menjangkau sektor kelautan dan perikanan, dengan cara bersinergi dengan Pelaku Jasa Keuangan (PJK) termasuk asosiasi, dengan sasaran akselerasi pertumbuhan di sektor kelautan dan perikanan melalui pembuatan *guideline* kepada sektor jasa keuangan dari hulu sampai hilir (*value chain*) serta peran serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

JARING merupakan akronim dari **Jangkau, Sinergi dan *Guideline***

2. Program JARING 2015 bertujuan menjawab kebutuhan *stakeholders* terhadap informasi tentang database Kelautan dan Perikanan, skim pembiayaan, pemetaan risiko bisnis dan dukungan regulasi dari otoritas terkait.

TARGET & SASARAN PROGRAM

Target utama program JARING adalah peningkatan pembiayaan di sektor Kelautan dan Perikanan yang terus bertumbuh serta mendorong perluasan akses masyarakat terhadap sektor jasa keuangan .

1. **Sasaran Jangka Pendek** Program JARING adalah meningkatkan pembiayaan kepada sektor kelautan dan perikanan tumbuh lebih dari 50% pada tahun 2015, antara lain melalui:
 - a) Penyediaan data dan informasi yang komprehensif mengenai sektor Kelautan dan Perikanan kepada SJK yang dituangkan dalam bentuk buku berisikan data dan informasi potensi bisnis dan peta risiko, *value chain* bisnis dan skim pembiayaan kepada sektor kelautan dan perikanan. Buku dilengkapi dengan uraian dukungan regulasi dari instansi terkait. Buku tersebut selanjutnya akan disebut Buku JARING.
 - b) Ketersediaan regulasi yang kondusif bagi pembiayaan SJK kepada sektor Kelautan dan Perikanan.
 - c) Sosialisasi Program JARING melalui kegiatan *Kick-Off* Program JARING dan serangkaian sosialisasi yang dilaksanakan OJK.
2. **Sasaran Jangka Menengah–Panjang** mulai tahun 2016 adalah mendorong peningkatan pembiayaan SJK kepada sektor Kelautan dan Perikanan secara bertahap melalui:
 - a) Perluasan pembiayaan ke seluruh sektor maritim, yang mencakup jasa kelautan, transportasi laut, bangunan kelautan, industri maritim, wisata bahari, dan energi dan sumber daya mineral.
 - b) Peningkatan kemampuan SDM Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB), nelayan, dan SJK melalui pelatihan bersertifikat yang diselenggarakan oleh OJK Institute.
 - c) program edukasi dalam rangka peningkatan pengetahuan masyarakat, khususnya di sektor kelautan dan perikanan, terhadap produk dan jasa dari SJK.

OJK Telah Menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan pada 5 Des 2014

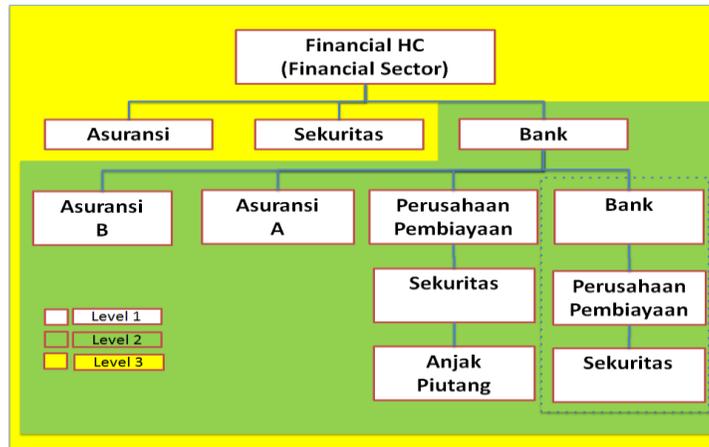
Keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*)* di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.



2015-2019 :

Kampanye , Training Analis LH, Pengembangan *green product*, *Green Bond* dan *Green Index*, akses LJK terhadap *Global Public Funds*, Koordinasi kebijakan SF

OJK telah menerbitkan ketentuan untuk pelaksanaan pengawasan terintegrasi



GCG Terintegrasi

- Kewajiban pembentukan komite GCG terintegrasi pada entitas utama
- Kewajiban melakukan asesmen atas pelaksanaan GCG secara terintegrasi



Manajemen Risiko Terintegrasi

- Kewajiban pembentukan satuan kerja manajemen risiko terintegrasi dan komite manajemen risiko terintegrasi
- Kewajiban melakukan asesmen profil risiko terintegrasi



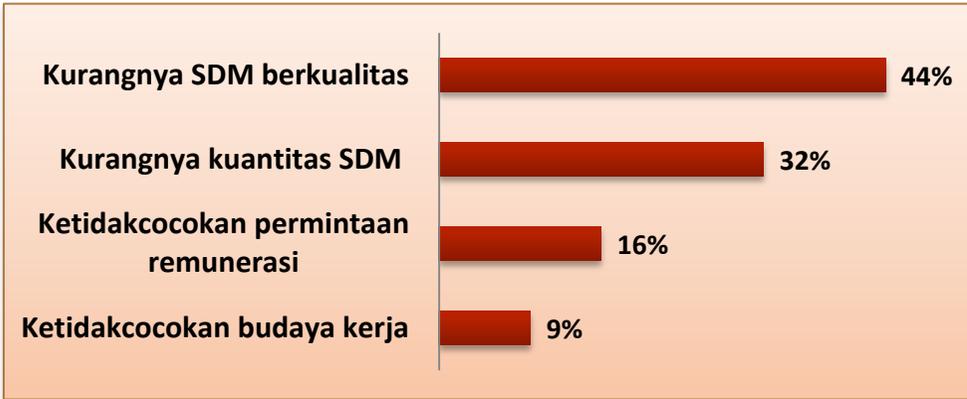
KPMM Terintegrasi

- Kewajiban kepada konglomerasi keuangan untuk menyediakan modal minimum secara terintegrasi



Bank diharapkan memiliki daya saing antara lain melalui dukungan SDM yang berkualitas

SDM berkualitas menjadi salah satu tantangan pengembangan SDM

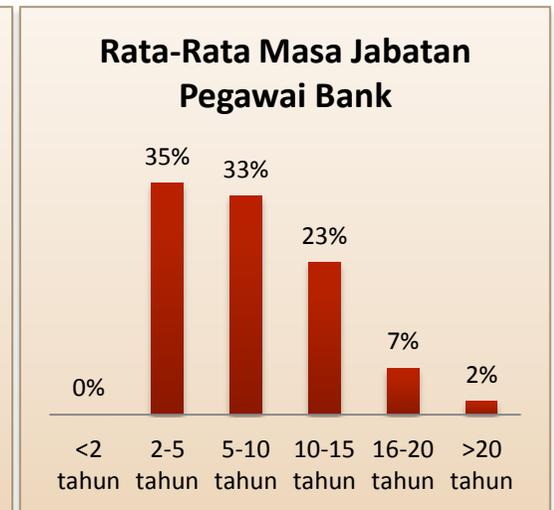
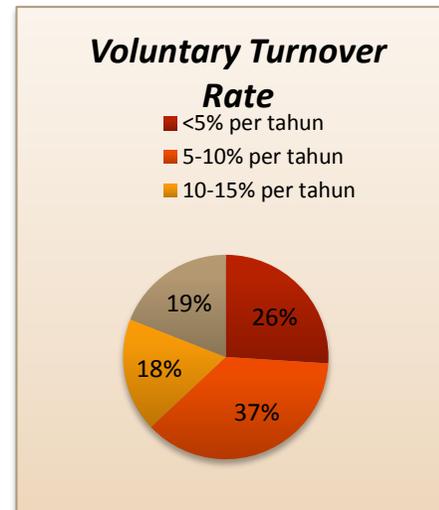


Berdasarkan hasil survey perbankan Indonesia tahun 2014 oleh PwC diketahui bahwa:

- 44% responden menyebut **kurangnya SDM berkualitas** sebagai kesulitan utama dalam memenuhi kebutuhan SDM bank.
- Fenomena **pembajakan karyawan** terjadi di industri perbankan Indonesia dengan alasan utama meliputi **pemberian paket kompensasi yang lebih baik** dan **prospek karir yang lebih baik**.
- Voluntary turnover rate** relatif tinggi pada tingkat 5-15% per tahun.
- Tingkat mobilitas pegawai** bank relatif tinggi yang tercermin dari rata-rata masa jabatan pegawai bank.

Arah kebijakan untuk penguatan SDM Perbankan :

1. Terus meningkatkan kualitas sertifikasi
2. Meningkatkan pemanfaatan dana pengembangan SDM yang telah diwajibkan sebesar 5% dari biaya SDM
3. Pengaturan atas pembajakan SDM perbankan
4. Pengembangan database bankir Indonesia



Dukungan SDM yang berkualitas perlu dibarengi dengan Sistem Remunerasi yang Prudent



System Remuneration yang terkait dengan risk taking behaviour

- Penentuan Material Risk Taker
- Pengaturan lebih menekankan kepada komponen remunerasi yang bersifat variable
- Sistem remunerasi yang tidak mengakibatkan risk taking behaviour antara lain melalui remunerasi yang ditunda pembayarannya (deferred)

Arah Kebijakan Bank Umum di Tahun 2016

Peningkatan Daya Tahan dan daya Saing untuk menghadapi perdagangan bebas

Financial inclusion untuk perluasan pasar dan mendorong pemerataan pembangunan

Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah

Laku Pandai

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri perbankan, dan industri jasa keuangan lainnya berkomitmen untuk mendukung terwujudnya keuangan inklusif.

Pemerintah Indonesia mencanangkan program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada bulan Juni 2012, yang salah satu programnya adalah *branchless banking*.

Branchless banking yang ada sekarang perlu dikembangkan agar memungkinkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya menjangkau segenap lapisan masyarakat di seluruh Indonesia.

Laku Pandai adalah ...

Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif, yaitu Program penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.



Arah Kebijakan Bank Umum di Tahun 2016

Peningkatan Daya Tahan
dan daya Saing untuk
menghadapi
perdagangan bebas

Financial inclusion untuk
perluasan pasar dan
mendorong pemerataan
pembangunan

Kebijakan
Pengembangan
Perbankan Syariah



Sejalan dengan visi pengembangan industri perbankan nasional, maka visi pengembangan perbankan syariah adalah : mewujudkan perbankan syariah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan & stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi

Arah Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Tahun 2016

7 (tujuh) Arah Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah

Secara umum, arah kebijakan pengembangan ditujukan untuk meningkatkan : sinergi kebijakan, daya saing perbankan syariah, customer based serta harmonisasi/integrasi regulasi dan pengawasan

- ➔ Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dg.pemerintah & stakeholder lain
- ➔ Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi
- ➔ Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan
- ➔ Memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk
- ➔ Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM & TI serta infrastruktur lainnya
- ➔ Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat
- ➔ Memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan

1

Kondisi 2015

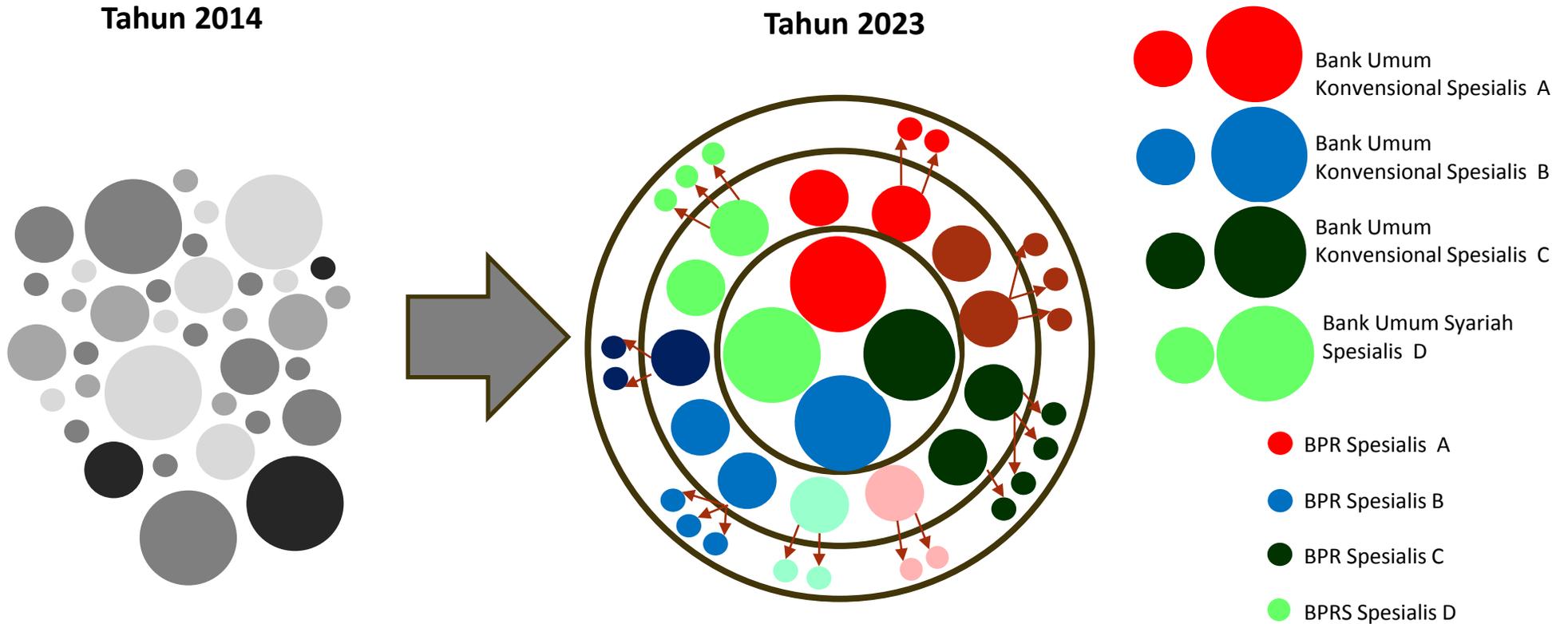
2

Tantangan di 2016

3

Arah Kebijakan
Jangka Panjang

Persaingan bank umum di Indonesia masih membuka kesempatan para perbankan untuk memiliki spesialisasi dan komparative advantage



TERIMA KASIH

